



Inovasi Kurikulum

<https://ejournal.upi.edu/index.php/JIK>



Model Implementasi Kurikulum Ornstein dan Hunkins: (Modernisme dan Postmodernisme)

La Ode Muhammad Safarudin¹, Rusman²
SMPN 1 Maginti¹, Universitas Pendidikan Indonesia²
edi.safarudin2015@gmail.com

Abstrak

Dalam menentukan arah penerapannya, kurikulum memerlukan model-model yang nantinya dapat dijadikan acuan, pedoman atau arahan bagi pergerakan kurikulum ke depan. Allan C. Ornstein dan Francis P. Hunkins dalam bukunya *“Curriculum: Foundation, Principles, and Issues”*, edisi ke-7, memaparkan model-model penerapan kurikulum, yang dibagi menjadi dua kategori model, yaitu model yang beraliran modernis dan model beraliran postmodernis. Dalam artikel ini, peneliti akan melihat sejauh mana perbedaan antara kedua jenis kategori model tersebut, dan apa implikasinya bagi implementasi kurikulum di Indonesia. Penulis menggunakan metode studi literatur pada artikel ini, yakni tentang model-model implementasi kurikulum modernisme dan juga postmodernisme. Temuan dalam penelitian ini yaitu terdapat perbedaan di antara model model implementasi kurikulum tersebut (aliran modernisme dan aliran postmodernisme), dan juga model-model implementasi kurikulum tersebut memberikan pengaruh terhadap perjalanan kurikulum di Indonesia.

Kata Kunci: Model Implementasi Kurikulum Ornstein-Hunkins; Modernisme; Postmodernisme

Abstract

In implementing the curriculum, all kinds of ideas must be conceptualized and directed. In determining the direction of its application, the curriculum requires models that can later be used as references, guidelines or directions for future curriculum movements. Allan C. Ornstein and Francis P. Hunkins in their book "Curriculum: Foundation, Principles, and Issues", 7th edition, describe curriculum implementation models, which are divided into two categories of models, namely modernist models and postmodernist models. In this article, the researcher will look at the extent of the differences between the two types of model categories, and what the implications are for curriculum implementation in Indonesia. The writer used literature study method in this article about models of curriculum implementation of modernism and postmodernism. The findings in this study are that there are differences between the models of curriculum implementation (modernism and postmodernism), and also that these curriculum implementation models give an influence on the course of the curriculum in Indonesia.

Keywords: Ornstein-Hunkins's Implementation Curriculum Models; Modernism; Postmodernism

PENDAHULUAN

Kita mungkin sering mendengar ataupun pernah mengalami (sebagai pendidik), terkadang implementasi kurikulum yang dilakukan oleh para pendidik berbeda antara guru yang satu dengan guru lainnya. Terdapat banyak faktor yang dapat mempengaruhinya, di antaranya adalah pemahaman pendidik terhadap implementasi kurikulum itu sendiri. Guru-guru “sepuh” biasanya masih banyak menerapkan metode yang sama dengan saat mereka di awal-awal menjadi guru, yakni metode ceramah, banyak mendikte siswa dengan banyak mencatat, suasana kelas yang hening tanpa suara. Berbeda dengan guru “masa kini” yang lebih melihat kondisi kelas lebih hidup, siswa diajak untuk berekspresi dan berpikir, meski terkadang akan sedikit ribut. Tentu saja, apa yang terjadi antara dua kasus di atas sah-sah saja, namun mesti dilihat jenis implementasi kurikulum manakah yang berlaku pada saat itu dan juga mesti ada pemahaman bagaimana sebuah kurikulum yang berlaku dapat diimplementasikan dengan benar.

Implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai pelaksanaan atau sebuah penerapan. Pandangan Fullan dalam [Majid \(2014\)](#) berkenaan dengan definisi implementasi, bahwasanya suatu proses realisasi terstruktur berkenaan dengan gagasan, desain, atau kumpulan beberapa kegiatan kontemporer dengan tujuan akhir adanya perubahan signifikan kepada individu. Ide ini dapat dimaknai sesuatu yang ingin “ditanam” dan nantinya dapat “dipanen”. Yang ditanam ini adalah sebuah gagasan, yang nantinya dapat digunakan oleh individu dan nantinya akan dipanen oleh individu tersebut pada periode akan datang di mana hasilnya adalah sebuah perubahan yang lebih baik. [Hamalik \(2011\)](#) berpendapat bahwasanya implementasi adalah terjadinya efek setelah adanya penerapan terhadap sesuatu, sedangkan implementasi kurikulum adalah realisasi desain kurikulum yang telah mengalami pengembangan terstruktur di awal, yang kemudian diujicobakan setelahnya dalam bentuk implementasi dan juga dengan adanya manajemen pengelolaan yang baik, sembari dilakukan penyesuaian intensif terhadap realitas di lapangan, misalnya pada idiosinkrasi peserta didik dalam hal perkembangan jasmani, intelektual dan emosional. Pandangan lain juga disampaikan oleh Saylor dan Alexander ([Majid, 2014](#)), yang mengutarakan bahwa implementasi kurikulum mengandung makna proses direalisasikannya desain kurikulum menjadi suatu pembelajaran yang di dalamnya terjadi interaksi antara peserta didik dengan guru dalam konteks pembelajaran. Pendapat ahli kurikulum lainnya yakni Miller dan Seller ([Hamalik, 2011](#)) mengemukakan bahwasanya implementasi kurikulum dimaknai sebagai suatu proses realisasi terhadap konsep, gagasan, desain, atau rangkaian kurikulum ke dalam aktivitas pembelajaran baru, yang mana hasil akhirnya adalah terjadinya perubahan yang diharapkan terjadi pada sekelompok individu. Pendapat di atas diperkuat oleh [Hamalik \(2011\)](#) bahwasanya implementasi kurikulum merupakan pengaktualisasian suatu kurikulum yang tertulis menjadi struktur pembelajaran.

Berdasarkan pengertian yang dipaparkan oleh para ahli di atas, sangat nyata adanya bahwa implementasi kurikulum tersebut hendaknya berkorelasi antara rencana kurikulum dengan aktualisasi pada pembelajarannya di kelas. Hal ini tentu saja sangat penting karena dalam pencapaian hasil yang maksimal akan ditentukan oleh implementasi yang baik dari rencana yang telah dibuat sebelumnya.

Dalam penerapan kurikulum, segala macam ide mesti disusun dengan terkonsep dan juga terarah. Dalam menentukan arah penerapannya tersebut, maka kurikulum memerlukan model-model yang nantinya dapat dijadikan rujukan, pegangan ataupun arah gerakan kurikulum ke depannya. Istilah model biasanya lebih dikenal pada dunia “*fashion*”, namun dalam dunia pendidikan istilah ini juga banyak digunakan untuk mendeskripsikan banyaknya pola, jenis, cara, atau metode. Istilah model dalam pendidikan, misal dalam implementasi kurikulum berarti pola-pola yang akan digunakan dalam penerapan kurikulum. Banyak ahli kurikulum telah memaparkan tentang model-model implementasi kurikulum ini, di antaranya adalah Allan C. Ornstein dan Francis P. Hunkins dalam buku mereka yang berjudul “*Curriculum: Foundation, Principles, and Issues*”, edisi ke-7 dan diterbitkan tahun 2018. Dalam buku tersebut, Ornstein dan Hunkins memaparkan berbagai hal tentang kurikulum, seperti landasan kurikulum, konsep-konsep

kurikulum, prinsip-prinsip kurikulum, dan isu-isu dalam kurikulum (Ornstein & Hunkins, 2018). Salah satu bahasan yang mereka berikan adalah model-model kurikulum. Bahasan tentang model kurikulum ini juga mereka kutip dari beberapa ahli. Maka, terdapat dua hal yang menjadi fokus tujuan artikel ini, yaitu: (1) melihat perbedaan pada dua kategori model implementasi kurikulum dalam buku Ornstein dan Hunkins tersebut, (2) mengetahui implikasi model-model implementasi kurikulum tersebut terhadap implementasi kurikulum di Indonesia.

TINJAUAN PUSTAKA

Dua kategori model implementasi kurikulum yang dipaparkan oleh Ornstein dan Hunkins dalam bukunya, sebenarnya berasal dari asumsi dua pemikiran yakni: modernis dan juga postmodernis. Lantas, apakah yang dimaksud dengan modernisme dan postmodernisme itu? Istilah modernisme pada awalnya merupakan istilah dalam keagamaan, pengetahuan, sosial politik, dan juga teknologi. Piirto (1999) dalam artikelnya memaparkan:

In religion, some say that modernism began with the Protestant reformation in the 16th century, which signaled a repudiation of the traditional authority of the Roman Catholic church and the cultivation of incredulity by such thinkers as Montaigne or Erasmus. Some say that modernism began in the 17th century with the scientific reformation signaled by the works of Galileo, Descartes, and Newton. Some say that modernism began in the 18th century with the republican rebellions in France and the United States. Some say it began with the industrial revolution in Europe in the 19th century. (Piirto, 1999)

Dengan adanya krisis yang menimpa Eropa pada saat itu, bidang-bidang yang lain pun turut mengalami goncangan perubahan. Dalam bidang seni perubahan yang terjadi juga mengikuti perubahan-perubahan pada bidang keagamaan, pengetahuan, sosial politik dan teknologi. Contoh yang bisa dilihat adalah seni ekspresionisme Van Gogh, kubisme Picasso, serta impresionisme Cassatt. Dalam bidang fiksi pun, perubahan ini terjadi; narasi aliran kesadaran James Joyce dan Virginia Woolf, maskulinitas ideal Hemingway dan London, serta eksplorasi sisi gelap diri oleh Conrad dan Melville. Perubahan lainnya pun juga terjadi di berbagai bidang, seperti: teater, puisi, musik, serta arsitektur (Piirto, 1999).

Istilah postmodernisme kali pertama dimunculkan oleh Rudolf Pannwitz, seseorang berkebangsaan Jerman pada tahun 1917 dan dikenal sebagai seorang filsuf di masanya. Dia menggunakan kata postmodernisme ini dalam konsep nihilisme dalam budaya abad ke-20 (Cahoone dalam Piirto, 1999). Pada tahun 1934, istilah ini dipakai oleh Federico de Onis, seorang kritikus sastra berkebangsaan Spanyol. Kemudian pada tahun 1939, seorang teolog bernama Bernard Iddings Bell, menggunakan istilah ini untuk menggambarkan kembalinya tradisi ke agama tradisional. Istilah postmodernisme secara luas digunakan dalam kritik sastra untuk menggambarkan reaksi balik terhadap modernisme artistik sekitar tahun 1950-an hingga 1960-an.

Dalam sejarahnya, telah banyak penelitian dilakukan yang membahas tentang perbedaan antara modernisme dan postmodernisme tersebut. Dan dari semua penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa postmodernisme merupakan antitesa dari modernisme. Foucault (dalam Boboc, 2012) memberi pandangan bahwasanya "...modernity and postmodernity as "oppositional attitudes" that coexist at any given time...". Tidak hanya itu, istilah modernisme dan postmodernisme terkadang memiliki konotasi yang berbeda dalam setiap penerapannya dalam berbagai bidang (Smart dalam Ilham, 2018). Lebih lanjut, istilah postmodernisme mengarahkan maknanya kepada kritik-kritik filosofis modernisme, epistemologi modernisme serta ideologi-ideologi yang berhubungan dengan modernisme (Butler dalam Ilham, 2018). Pandangan yang lebih ekstrim disampaikan oleh Anthony Giddens (dalam Maksum, 2012) mengenai modernisme. Dia berpendapat bahwa modernisme menimbulkan petaka bagi dunia, di antaranya: cara

penyelesaian suatu sengketa dengan cara keadilan, ketidakberdayaan si lemah terhadap penindasan si kuat, semakin gawatnya disparitas sosial, persoalan kehidupan yang semakin memprihatinkan. Atas dasar itulah, konsep postmodernisme dibentuk oleh pemikir-pemikirnya dalam rangka melakukan dekonstruksi cara pandang terhadap berbagai bidang keilmuan, sehingga pada akhirnya arketipe yang baru dapat terbentuk secara konsisten dalam bidang-bidang ilmu tersebut secara nyata.

Terlihat bahwa terdapat perbedaan konsep antara modernisme dan juga postmodernisme dari berbagai sisi. Berikut ini adalah beberapa perbedaan istilah dalam aliran modernisme dan postmodernisme:

Tabel 1
Perbedaan Istilah Modernisme dan Postmodernisme

No	Modernisme	Postmodernisme
1	Sentralisasi	Desentralisasi
2	Pertarungan kelas	Pertarungan etnis
3	Konstruksi	Dekonstruksi
4	Kultur	Sub-kultur
5	Hierarki	Anarki
6	Teori	Paradigma
7	Kekuatan negara	Kekuatan bersama
8	Agama	Sekte-sekte
9	Budaya tradisional	liberalisme

Sumber: (Maksum, 2012)

Lantas, seperti apakah perbedaan antara modernisme dan juga postmodernisme dalam kurikulum pendidikan, khususnya dalam implementasi kurikulum? Dalam buku Allan C. Ornstein dan Francis P. Hunkins *“Curriculum: Foundation, Principles, and Issues”*, edisi ke-7, penulis akan memberikan studi literatur yang nantinya dapat dilihat model-model implementasi kurikulum apa saja yang menjadi bagian dari kategori modernism model dan juga postmodernism model. Serta melihat hal apa-apa saja yang termasuk kekhususan dari masing-masing model dalam dua kategori (modernisme dan postmodernisme) tersebut. Jika kita sudah melihat masing-masing model implementasi kurikulum tersebut, selanjutnya penulis akan menganalisa implikasi model-model kurikulum apa saja yang menjadi dasar dalam implmentasi kurikulum di Indonesia.

Allan C. Ornstein dan Francis P. Hunkins memaparkan secara detail tentang model-model implementasi kurikulum dengan bersumber dari beberapa ahli-ahli berbeda arah konsepnya, yakni *modernist models* dan *postmodernist models*. Dalam bahasa ini nantinya akan terlihat jelas perbedaan model-model dari dua kategori tersebut.

A. Modernist Models

Model implementasi kurikulum yang pertama ini merupakan hasil pemikiran dari kaum *modernist*. Ornstein & Hunkins (2018) mengatakan bahwa

Individuals who adhere to modernist approaches to curriculum implementation accept that there are various defined rules and procedures for creating change and developing and implementing new curricula.(Ornstein & Hunkins, 2018)

Model implemetasi yang dianut oleh kaum ini merupakan model yang penuh dengan keteraturan. Terdapat prosedur, tata cara dan aturan yang mesti dilewati untuk melakukan sebuah perubahan ataupun

pengembangan dalam implementasi kurikulum. Di antara model-model implementasi kurikulum *modernist* ini yaitu:

1. Overcoming-Resistance-to-Change Model

Model ini diperkenalkan oleh Neal Gross. Seperti halnya nama model implementasi kurikulum ini, perubahan terhadap sesuatu adalah natural dan merupakan kesatuan sikap dari seorang pemimpin kepada bawahannya agar sebuah program tidak akan mendapatkan penolakan yang disebabkan oleh keragu-raguan. Pelibatan seluruh komponen sangat diperhatikan, mulai dari administrator, direktur, guru, pengawas, hingga seluruh staf di bawah. Pendidik selayaknya seorang psikolog pendidikan mesti mampu menggunakan model ORC ini dalam porsi pengetahuan yang mumpuni serta bertanggung jawab terhadapnya, maksudnya adalah pendidik tahu atau mengenal dengan baik terhadap kurikulum yang akan diimplementasikannya serta bagaimana kurikulum tersebut mampu berdampak terhadap perkembangan ilmu peserta didik. Hal buruk yang mungkin bisa saja terjadi adalah tatkala pendidik tidak mampu menguasai kurikulum tersebut, yang pada akhirnya akan terjadi penolakan atau ketidakterimaan atau dengan kata lain akan menjadi lawan inovasi kurikulum tersebut. Salah satu unsur penting dalam pengimplementasian kurikulum yaitu peranan dari pimpinan kurikulum di sekolah, dalam hal ini kepala sekolah. Kepala sekolah sebagai pemimpin kurikulum mesti memberikan sinkronisasi terhadap implementasi kurikulum antara kehidupan sekolah dan kehidupan luar sekolah secara profesional. Selain itu, mereka bertugas untuk meyakinkan pelaksana kurikulum bisa berpikir *out of the box* untuk dapat menerima kurikulum secara sukarela, sehingga tidak terdapat penolakan yang dapat mempengaruhi eksistensi kurikulum. Cara lain yang dapat dilakukan agar kurikulum diterima oleh pelaksana yakni adanya prinsip kerja sama atau rasa kepemilikan terhadap kurikulum oleh semua unsur, mulai dari pimpinan, administrator, pengawas, dan guru. Yang terjadi kemudian adalah pola kerja kurikulum yang baik dan juga terarah.

Namun, tidak dapat dipungkiri, serapi apapun kurikulum tersebut dibuat kesalahan tetap akan terjadi. Kesalahan itu bisa saja bersumber dari awal perencanaan, hingga implementasinya, atau dapat pula berupa kesalahan dalam pengambilan kebijakan oleh pimpinan. Untuk itu, perlu adanya mental yang kuat untuk menyelesaikannya. Kerja sama tim yang solid juga sangat diperlukan. Yang tidak kalah pentingnya adalah berani mengambil risiko terhadap dampak yang mungkin bisa terjadi, serta belajar dari kesalahan sebelumnya. Intinya adalah kurikulum bukanlah pekerjaan yang dilakukan secara orang per orang, akan tetapi dibutuhkan kerja sama tim terhadap fokus hasil yang mesti dicapai dalam implementasi kurikulum. Salah satu fokus dari model implementasi kurikulum ORC adalah penjagaan terhadap keterlibatan siswa dalam pengembangan kurikulum serta inovasi-inovasinya. Namun, hal itu tidak berlaku bagi guru. Peranan guru sebagai pelaksana teknis di lapangan sangat perlu untuk dilibatkan dalam pengembangan awal implementasi kurikulum. Hal ini ini kerena temuan-temuan yang mereka dapatkan di lapangan yang berpengaruh dengan siswa dapat berubah sesekali waktu tergantung kondisi yang terjadi.

2. Organizational-Development Model (OD)

Model implementasi ini dikembangkan oleh Richard Schmuck dan Matthew Miles pada tahun 1970. Mereka beranggapan bahwa terjadi banyaknya kegagalan dalam upaya peningkatan pendidikan yang dilakukan oleh banyak lembaga pendidikan. Salah satu bentuk kegagalan dalam proses ini adalah adanya anggapan bahwa "...*the leaders assume that adoption is a rational process and rely too heavily on innovation's technical aspects. Such leaders assume that systematic properties (e.g., class size, school organization) of local school districts are constants...*". (Ornstein & Hunkins, 2018). Hal ini tentu saja akan menjadi persoalan jika pemimpin kurang dapat memberikan asumsi yang tepat terhadap cara peningkatan yang diinginkan. Untuk itulah Richard Schmuck dan Matthew Miles mengembangkan sebuah model yang diberi nama *Organizational-Development Model (OD)*. Model ini menekankan pada

pengdiagnosisan serta pengkolaboratifan manajemen dalam mengatasi masalah kurikulum. Dengan kata lain adanya kerja sama tim dan adanya budaya organisasi dalam pengimplementasian kurikulum.

French dan Bell (dalam [Ornstein & Hunkins, 2018](#)) mengemukakan tujuh karakteristik dari *Organizational-Development Model* jika dibandingkan dengan model-model lainnya dalam hal pengorganisasian. Ke-tujuh karakteristik tersebut adalah:

- a. Pemfokusan terhadap kerja sama antara tim dalam mengatasi masalah
- b. Pemfokusan terhadap proses yang terjadi, baik di dalam kelompok ataupun antarkelompok
- c. Pengaplikasian penelitian tindakan
- d. Pemfokusan terhadap kolaborasi dalam tataran manajemen
- e. Pemahaman terhadap budaya pengaturan mesti diperlakukan sebagai bagian dari keseluruhan sistem
- f. pemahaman bahwasanya penanggung jawab organisasi berperan dalam hal konsultasi atau memfasilitasi pihak-pihak yang berkepentingan terhadap kurikulum
- g. analisis terhadap dinamika berkelanjutan organisasi dalam lingkungan yang terus berubah.

Berdasarkan tujuh karakteristik di atas, dapat dipahami bahwa *Organizational-Development Model* mendeskripsikan implementasi sebagai suatu proses interaktif yang terus menerus ada (berkelanjutan). Pendekatan tersebut bertumpu pada sebuah asumsi bahwa individu sangat peduli dengan masa depan dan *berkeinginan* untuk terlibat aktif dalam merancang, mengembangkan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi sistem pendidikan. *Organizational-Development Model* memperlakukan implementasi sebagai kegiatan yang tidak akan pernah selesai. Selalu ada ide-ide baru yang kemudian akan diaplikasikan pada program baru, materi dan metode baru untuk dicoba, dan siswa akan memiliki semangat baru dalam pengaplikasiannya. Penerapan kurikulum secara terus-menerus serta melibatkan guru dan siswa dalam kurikulum dengan menyediakan pembelajaran yang memiliki asas kebermanfaatannya bagi semua pihak.

3. Concerns-Based Adoption Model (CBA)

Concerns-Based Adoption Model adalah model yang lebih menonjolkan pada perubahan individu. Model yang dikembangkan oleh F.F Fuller ini memandang bahwa setiap individu memiliki pemahaman atau pemikiran yang berbeda antara satu dengan lainnya. Perubahan yang terjadi pada setiap individu juga akan mempengaruhi seluruh proses yang terjadi, tidak hanya pada diri mereka sendiri, akan tetapi juga pada lingkungan sekitar mereka. Perubahan ini pula akan berlangsung pada kehidupan pribadi dan kehidupan profesional mereka. Agar individu menyukai perubahan, mereka harus melihat perubahan itu terjadi pada diri mereka sendiri meskipun tidak secara keseluruhan. Pada akhirnya, perubahan dalam CBA akan melibatkan banyak individu, maka akan memakan waktu yang lama untuk pengaplikasiannya. Seperti dalam peristilahannya; *adoption* (adopsi), model implementasi ini hanya mengadopsi implementasi, namun tidak melakukan pengembangan dan mendesain.

Model CBA dalam proses analisisnya, guru dan juga seluruh bagian dari sekolah telah menganalisis semua kebutuhan mereka dan juga telah memilih kurikulum yang sesuai dengan identitas sekolah mereka tersebut. Selain itu, model CBA ini menjawab apa yang menjadi kekhawatiran guru dalam hal konten, materi, pedagogi, teknologi, dan pengalaman pendidikan ([Ornstein & Hunkins, 2018](#)). Dapat dipahami bahwa kekhawatiran guru dalam proses implementasi kurikulum pasti nyata adanya. Kekhawatiran yang mereka alami biasanya diawali dengan rasa khawatir pada diri sendiri, lalu kekhawatiran pada mengajar mereka, lalu yang terakhir kekhawatiran pada siswa yang mereka ajar. Berkaitan dengan hal tersebut, Lieberman dan Miller (dalam [Ornstein & Hunkins, 2018](#)) memberikan urutan yang sama dari kekhawatiran guru sebagai berikut:

- a. Kesadaran terhadap pentingnya inovasi

- b. keinginan untuk memiliki pengetahuan akan inovasi, tetapi tidak ada memiliki kesadaran bahwa inovasi dapat secara langsung mempengaruhi mereka.
- c. Adanya pertanyaan di diri pendidik apakah mereka memiliki kecakapan dan wawasan tentang penerapan inovasi.
- d. Adanya keraguan pada diri pendidik mengenai tata cara pengelolaan waktu dan sumber daya yang dimiliki dalam pengimplementasian kurikulum agar berjalan dengan sukses, serta bagaimana cara mendistribusikan pengetahuan tersebut kepada siswa dengan nyata.
- e. pendidik terfokus pada seberapa besar pengaruh kurikulum terhadap pembelajaran siswa.

Dalam model CBA, peranan guru adalah mengimplementasikan kurikulum yang ada, namun setelah kekhawatiran telah tertangani dengan baik. Kreativitas, modifikasi, kerja sama antara rekan-rekan guru serta penyesuaian dengan siswa sangat perlu selalu dilakukan agar implementasi dapat berjalan dengan maksimal.

4. Systems Model

System Model adalah model implementasi kurikulum yang mengarahkan kerjanya kepada kesatuan sistem yang terstruktur dan rapi serta adanya hubungan antara bagian-bagian yang menjadi pelaksana, seperti guru, dan yang lainnya. Model OD maupun CBA pada dasarnya juga menerapkan model sistem ini. Hal ini disebabkan kedua model implementasi tersebut juga berhubungan dengan hubungan-hubungan yang erat antara pelaksana kurikulum. Dan semua bagian tersebut tidak dapat dipisahkan, meskipun terdapat ketidaksinkronan antara bagian atas (pusat) ataupun di tataran bawah (sekolah). [Ornstein & Hunkins \(2018\)](#) menyatakan bahwa sekolah adalah gabungan organisasi unit yang longgar yang terkadang terdapat ketidaksesuaian dengan kebijakan di pusat. Implementasi kurikulum di sekolah terkadang mengikuti apa yang menjadi kekhasan yang terdapat dalam masyarakat di mana sekolah itu berada. Kontrol pusat tidak lepas terhadap implementasi seperti ini, maka sistem itulah yang akan mengaturnya dengan baik. Perubahan-perubahan yang terjadi di sekolah pun mesti tetap mengarah pada kerangka besar pendidikan yang telah disusun pusat. Kondisi seperti ini banyak ditemui pada implementasi kurikulum muatan lokal ataupun pada lembaga pendidikan Islam, yang mana porsi implementasi kurikulum pada lembaga Islam tersebut lebih kuat pada pengembangan afektif siswa dalam hal ini pengembangan sifat ke-Islaman siswa. Siswa diajak untuk selalu berkembang setiap waktu, "...*Although the teacher may be the same, his or her behaviors in engaging students with the implemented curriculum are unique. Different students, different times, and different demands on all the players in the educational theater are unique...*" ([Ornstein & Hunkins, 2018](#))

Tidak bisa dipungkiri bahwasanya saat kita menerapkan *System Model* pada implementasi kurikulum, pada dasarnya sedang terjadi keteraturan di dalamnya seperti halnya sistem tata surya; di dalamnya terdapat bintang, planet, galaksi yang mengorbit dengan teratur dan tetap saja bagian-bagian tata surya tersebut berada pada jalur mereka masing-masing. Begitupun halnya dalam implementasi kurikulum, seluruh komponen, seperti siswa, guru, kepala sekolah akan berperan dalam keteraturan tersebut, meski sekali lagi akan terjadi konflik, namun semua pihak akan berusaha memperbaikinya untuk kemaslahatan bersama. Yang perlu menjadi perhatian lainnya adalah para inovator kurikulum mesti memahami bahwasanya kajian mereka dalam pengembangan kurikulum terus berjalan dan tidak pernah berhenti, karena kurikulum itu akan terus berkembang dari masa ke masa. Maka, perubahan bisa saja terjadi demi keberhasilan pembelajaran yang akan dicapai oleh siswa. Pada dasarnya pendidik harus kreatif dan tidak pernah berpuas diri dalam mengembangkan kreativitas mereka ([Ornstein & Hunkins, 2018](#)).

B. Postmodernist Models

Jenis model implementasi berikutnya adalah *Postmodernist Models*. Di antara jenis model implementasi kurikulum postmodernist yaitu:

1. Curriculum-in-the-Making

Model implementasi kurikulum ini diperkenalkan oleh Wolff-Michael Roth. Roth (dalam Ornstein & Hunkins, 2018) memberikan pemaparan tentang tiga karakteristik dari model ini, bahwasanya *“Curriculum is always in the making, never completed. The curriculum is “living.” Infinite results are always present from curricula implemented”*. Pandangan yang disampaikan oleh Wolff-Michael Roth tersebut, dapat dikatakan bahwa kurikulum itu akan selalu bergerak, tidak konstan/stagnan. Apa yang diberikan guru hari ini, hasilnya bisa saja dapat berbeda dengan apa yang akan dijadikan siswa sebagai acuan tindakan di masa-masa yang akan datang. Hal ini tergantung pada perkembangan ilmu yang ada dan yang mereka miliki. Maka, tidak ada implementasi yang terus-menerus digunakan, suatu saat akan tergantikan atau terbaharui dengan hal yang baru. Hal ini dikarenakan *“Too many other factors are at play: the students’ abilities, their interests, their social situations, and their cultural backgrounds, among other factors. Also, we must consider the teacher’s competence, interest in the subject matter, even the teacher’s social and cultural background”* (Ruth dalam Ornstein & Hunkins, 2018). Pendapat ini dapat dikatakan rasional dan nampaknya sesuai dengan konsep implmentasi kurikulum yang sedang berlaku di negara Indonesia, yakni kurikulum 2013.

2. Myriad approach models, Individual conceptualized, implementation processes, stressing liberating praxis

Model implementasi kurikulum ini diperkenalkan oleh Patrick Slattery. Sebagai seorang penganut postmodernist, apa yang menjadi penekanan Slattery dalam kajiannya adalah keunikan dari setiap individu. Dan ini merupakan pandangan dari setiap postmodernist. Mereka menganggap bahwa kemunculan postmodernisme merupakan kritik terhadap modernisme dan pengaruhnya dalam berbagai kajian pendidikan yang terlalu bersifat kaku dan juga ketat dalam hal perubahan. Slattery dalam kajiannya memberikan pandangan bahwa *“Each individual challenged to generate own unique approach to curriculum development and implementation”* (Slattery dalam Ornstein & Hunkins, 2018).

Pandangan Slattery tentang postmodernisme menekankan pada kebebasan dalam implementasi kurikulum. Metode atau pendekatan yang sifatnya tunggal apa pun itu untuk konsep pemikiran mengenai pendidikan, termasuk pengembangan dan implementasi kurikulum tidak digunakan. Setiap individu harus bisa dan juga harus mampu menantang dirinya sendiri dalam mengembangkan aktivitas pembelajaran mereka sendiri secara mandiri. Catatan Slattery bahwasanya guru dapat saja memberikan konsep materi di awal, namun untuk mengembangkan materi tersebut menjadi sesuatu yang berterima oleh siswa, langkah-langkah teknisnya dilakukan oleh siswa sendiri. Meskipun Slattery tidak benar-benar menjelaskan langkah-langkah khusus dalam mengembangkan kurikulum postmodern, dia menyarankan adanya catatan dan pendekatan yang menjadikan individu sebagai subjek kurikulum baik di sekolah (lingkungan pembelajaran), maupun di luar sekolah. Dia menganjurkan bahwa *“...teachers of this persuasion foster in their classrooms “reflective dialogue, autobiographical journals, nonconfrontational debate, cooperative investigations, and probing questions...”* (Slattery dalam Ornstein & Hunkins, 2018). Slattery memberikan gambaran bahwa dalam kurikulum postmodernisme mesti ada keterpaduan pengetahuan, perpaduan pengalaman belajar, adanya komunitas yang dapat membantu dalam pengembangan diri, baik yang lokal maupun internasional,

3. Complexity theory influenced William E. Doll Jr. approaches

“Complex relations cannot be distilled into simple incidents. Complexity deals with interactive dynamic systems” (Doll dalam [Ornstein & Hunkins, 2018](#)). Demikianlah pandangan yang disampaikan oleh William E. Doll Jr. tentang model implementasi kurikulum. Lebih lanjut, Doll menjelaskan bahwa siswa harus menjadi desainer terhadap arah pengetahuan mereka sendiri nantinya dan juga sikap mereka dalam mengaplikasikan sendiri pengetahuan tersebut. Namun, seperti yang direkomendasikan Doll, peranan guru adalah untuk membantu siswa menjawab tantangan dalam menyusun pengalaman unik mereka dalam pembelajaran dan pemahaman yang komprehensif tentang pengetahuan yang mereka miliki serta sikap yang dihasilkan sebagai efek dari pengetahuan yang mereka miliki sebelumnya. Sebagai sistem yang dinamis, *complexity theory* dapat melibatkan siswa dalam pengembangan dan juga implementasi kurikulum, namun tidak sampai membuat program mereka sendiri. Kaum modernis, seperti halnya kaum postmodernis, menyadari bahwa proses pendidikan adalah proses yang selalu berjalan maju dan berkelanjutan sampai batas yang tidak ditentukan. Sikap saling berseberangan konsep hendaknya disudahi dan diubah menjadi penyatuan konsep, paling tidak dapat dicari variabel yang dapat menyamakan persepsi di antara keduanya. Visi dalam pendidikan sejatinya adalah sama; menginginkan kebaikan bagi semua pihak, khususnya peserta didik. Maka dari itu, sikap egoisme hendaknya dapat diredam, sehingga semua pihak mendapatkan ketenangan.

Demikianlah berbagai model implementasi kurikulum yang dipaparkan oleh Ornstein dan Hunkins dalam buku mereka. sebagai tambahan [Nădrag & Gălbează \(2015\)](#) dalam jurnalnya memaparkan terdapat pandangan yang berbeda antara model implementasi kurikulum modernisme dan postmodernisme. Menurut mereka, pada model modernisme terdapat karakteristik yang terjadi:

- a. *Top-down*, yakni peran guru hanya sebagai administrasi pendidikan yang bertugas menjalankan segala kebijakan kurikulum dari pengembang/ penulis kurikulum. Hal ini terjadi pada masa tahun 1960-an hingga 1970-an di Amerika Utara dan Inggris Raya.
- b. Karakteristik kedua yakni *bottom-up*. Hal ini terjadi di tahun 1970-an hingga 1980-an, dimana terjadi kesenjangan terhadap konsep dan juga praktik terhadap kurikulum terpusat.
- c. Karakter terakhir yakni *partnership*. Model yang dikembangkan pada tahun 1980-an hingga 1990-an ini merupakan model yang mengolaborasikan semua pihak, mulai dari administrator, pengembang kurikulum, asosiasi profesional, peneliti, guru, dan orang tua dalam konteks lokal. Dalam pelaksanaannya, terdapat kritik terhadap model ini, yang mana terdapat implementasi yang salah, lalu desain yang buruk, visi sekolah yang terlalu mendapat kontrol dari pusat, hingga visi pengetahuan yang seharusnya dimiliki oleh siswa terdapat ketidakcocokkan dengan pusat.

Berbeda dengan model modernisme, konsep postmodernisme dalam implementasi kurikulum lebih melihat kurikulum sebagai sistem yang terbuka, perlu adanya analisis wacana tentang pengetahuan tertentu, dan selanjutnya adanya analisis wacana yang lebih kritis ([Campbell, 2018](#)). Lyotard sebagai salah satu postmodernist, banyak memberikan pendapat-pendapat yang selalu bertentangan dengan modernisme. Salah satu prinsip yang ditentang oleh Lyotard adalah kesatuan ontologis. Pandangannya tentang prinsip kesatuan ontologis sudah tidak relevan dengan kondisi masa kini. Sebaliknya, tawaran yang diberikan olehnya adalah adanya konsep pluralitas ([Hamengkubuwono, 2016](#)). Macdonald (dalam [Nădrag & Gălbează, 2015](#)) menjelaskan kurikulum dalam konsep postmodernisme selalu konstan dan kompleks dalam interaksinya, cara pandang pembelajaran yang menjadikan siswa sebagai “produsen pengetahuan” dibanding “konsumen pengetahuan”, serta bersifat transformatif. Terdapat beberapa teori yang dikemukakan oleh Macdonald terkait implementasi kurikulum postmodernisme ini:

- a. *Death of The Subject*. Dalam teori ini, dokumen kurikulum bukan lagi merupakan penjabaran dari topik yang disediakan oleh pihak akademik ke dalam materi pembelajaran. Akan tetapi, dokumen

tersebut menjadi sesuatu yang bersifat baru dan bervariasi. Kurikulum tidak hanya berlaku di dalam kelas saja, akan tetapi juga berlaku dalam kehidupan sehari-hari (Macdonald, 2003)

- b. *Equity*. Dalam proses pendidikan guru bertugas untuk mengakomodasi segala hal yang dibutuhkan oleh siswa untuk berkembang. Satu hal yang tidak boleh dilupakan yaitu guru mesti mengetahui apa yang menjadi pengetahuan awal yang di bawah oleh siswa ke sekolah. Pengetahuan tersebut bisa berasal dari lingkungan keluarga, pertemanan, ataupun pengetahuan lainnya. Guru harus mampu bersifat adil terhadap pola perkembangan siswa tersebut. Terkadang apa yang kita berikan kepada siswa tidak akan bersesuaian dengan apa yang terdapat pada dokumen perencanaan yang telah disusun oleh guru sebelumnya. Maka dari itu, guru mesti jeli melihat apa yang dibutuhkan siswa, bukan terpaku pada dokumen yang ada. (Macdonald, 2003)
- c. *Global Technology and Free-range Learning*. Kurikulum memandang bahwa pembelajaran akan selalu beriringan dengan teknologi. Teknologi memberikan sumber pengetahuan yang tak terbatas kepada siswa. Dengan demikian, pendidikan akan lebih berkembang pesat jika kurikulum memberikan ruang kepada teknologi untuk pengetahuan siswa.

METODE

Penulis menggunakan metode studi literatur pada artikel ini, yakni tentang model-model implementasi kurikulum modernisme dan juga postmodernisme setidaknya dengan melakukan dua langkah, yakni mengkaji literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian serta mengumpulkan data melalui studi pustaka (Danandjaja, 2014). Studi literatur dimaknai dasar untuk pengembangan pengetahuan, membuat pedoman untuk kebijakan dan praktik, dan juga memiliki kapasitas sebagai awal dari ide-ide baru untuk penelitian selanjutnya (Snyder, 2019). Dalam artikel ini penulis menganalisis berbagai sumber tertulis yang relevan, serta menelaah secara kritis berkenaan dengan tujuan penulisan artikel. Sumber literatur yang dijadikan rujukan yakni berasal dari artikel-artikel yang relevan, buku teks, serta sumber-sumber lain yang dapat membantu menemukan jawaban dari tujuan artikel ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Model Implementasi Kurikulum Modernisme vs Postmodernisme

Pandangan penulis, jika kita melihat pandangan modernisme dan juga postmodernisme dalam implementasi kurikulum, pada dasarnya tidak terdapat perbedaan yang sangat ekstrim di antara keduanya, meski tetap memiliki perbedaan di beberapa sisi. Salah satu bentuk perbedaan dari keduanya yakni dalam aktivitas hermeneutika (interpretasi), bahwasanya “...modernists engage in such inquiry so as to attain a significant degree of pre-cision in their understandings, while postmodernists use such analyses to challenge the views and assumptions of the modernists...” (Ornstein & Hunkins, 2018). Apa yang dilakukan oleh kaum modernis dalam aktivitas menginterpretasi pengetahuan adalah sebagai sebuah proses yang bertujuan untuk adanya kemajuan pemahaman mereka pada level yang lebih tinggi dan signifikan, sedangkan pada kaum postmodernis, penggunaan analisis semacam itu ditujukan untuk melawan pandangan dan asumsi dari kaum modernis. Kaum modernis menyatakan dengan kepercayaan yang tinggi bahwasanya pandangan mereka logis secara akademik, meskipun dilihat dari berbagai sisi (intelektual, politik, sosial). Postmodernis menantang pandangan seperti itu, karena bagi mereka yang lebih penting adalah berusaha untuk mencari kontradiksi internal metanarasi dengan mendekonstruksi gagasan modern tentang kebenaran, bahasa, pengetahuan, dan kekuasaan (Ornstein & Hunkins, 2018), selain itu postmodernisme tidak sejalan dengan teori rasionalitas yang sifatnya universal, namun yang terjadi adalah kenisbian yang bersifat eksistensi puspawarna (Setiawan & Sudrajat, 2018). Dan lebih dari itu, postmodernisme dapat membantu kita dalam melihat sesuatu lebih bijak (Loewenthal, 2003).

Analisa lainnya yakni perbedaan antara model modernisme dan postmodernisme dapat dilihat dari kebijakan pengembangan dan pelaksanaan implementasi kurikulum. Dari keseluruhan model

modernisme, penulis melihat adanya kesatuan yang sistematis, mulai dari atas hingga pelaksanaan di bawahnya (sentralisasi). Semua yang terlibat di dalam pengembangan kurikulum bersumber dari satu pintu, yakni atasan, baru kemudian akan diteruskan oleh administrator, pengawas, ataupun guru. Meskipun begitu, dalam pelaksanaannya terkadang akan sedikit berbeda dengan konsep awal yang dibebankan oleh atasan. Agak berbeda dengan model-model dalam postmodernisme, kebijakan justru dapat berubah pada tataran implementasi karena objek implementasi, yakni siswa juga berperan serta di dalamnya (desentralisasi).

Perbedaan antara model-model implementasi kurikulum modernisme dan postmodernisme juga dapat dikaitkan dengan pemain kunci atau yang banyak berperan di dalamnya. Seperti apa yang telah penulis sebutkan di atas, salah satu hal yang membedakan pemain kunci antara model modernisme dan postmodernisme adalah keterlibatan siswa. Dari keseluruhan model implementasi kurikulum modernisme, siswa diperlakukan sebagai objek kurikulum yang siap menerima segala macam hal dari guru. Siswa tidak leluasa diberi ruang untuk melakukan proses berpikir kritis terhadap pengetahuan yang diberikan kepada mereka. tugas mereka adalah menerima mentah-mentah dan mengamalkannya dalam kehidupan pendidikan, ataupun keseharian mereka. berbeda halnya dengan model implementasi kurikulum postmodernisme, yang mana siswa memiliki peranan sebagai pemain kunci dalam kurikulum. Siswa dapat berpikir kritis, bebas, berkreasi terhadap pengetahuan yang mereka peroleh. Namun, proses berpikir kreatif ini juga mesti mendapatkan bimbingan dari guru yang bertugas sebagai fasilitator atau media konsultasi bagi siswa agar tidak keluar jalur. Bagi penulis, hal inilah yang menjadi pembeda esensi antara dua model implementasi kurikulum ini.

B. Implikasi Model-Model Implementasi Kurikulum Ornstein dan Hunkins Terhadap Implementasi Kurikulum di Indonesia

Implementasi kurikulum di Indonesia telah berlangsung semenjak proses pendidikan itu telah dilakukan oleh para pendahulu-pendahulu bangsa ini sejak sebelum kemerdekaan, awal-awal pasca kemerdekaan hingga hari ini. Sejak Indonesia merdeka hingga hari ini, perubahan kurikulum di Indonesia terjadi sebanyak dua belas kali, ditandai dengan lahirnya kurikulum 1947 hingga kurikulum 2013. Dalam perkembangannya, di setiap era kurikulum terdapat karakteristik yang membedakan dan menjadi ciri khas antara suatu era kurikulum dengan era lainnya, meski terdapat karakteristik yang hampir sama di beberapa era. Pada masa Orde Lama, di bawah kepemimpinan presiden Sukarno, telah berlaku sebanyak tiga perubahan kurikulum, yakni: (Kurikulum) Rencana Pelajaran tahun 1947, (kurikulum) Rencana Pelajaran Terurai 1952, serta (Kurikulum) Rencana Pendidikan Sekolah dasar tahun 1964. Lalu pada masa Orde Baru, yang mana Suharto sebagai kepala negara pada saat itu terjadi enam kali perubahan kurikulum; yang pertama adalah Kurikulum 1968, yang ke dua adalah Kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) tahun 1973, kemudian Kurikulum SD tahun 1975, Kurikulum 1984, lalu Kurikulum 1994, dan terakhir yaitu Revisi Kurikulum 1994 pada tahun 1997. Dan, terakhir pada masa setelah Orde baru yang dikenal dengan masa Reformasi hingga hari ini telah terjadi sebanyak tiga kali perubahan kurikulum, yaitu: Rintisan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) tahun 2004 yang mana kepala negara saat itu yaitu bapak Susilo Bambang Yudoyono, lalu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) tahun 2006 dan terakhir Kurikulum 2013 yang mana presiden pada saat itu adalah bapak Joko Widodo. Berikut ini adalah penjelasan singkat dari penulis tentang perkembangan dari masing-masing kurikulum di Indonesia dari masa ke masa:

Tabel 2
Perkembangan Kurikulum di Indonesia

Tahun	Kurikulum	Karakteristik
1947	Rencana Pelajaran (Dirinci dalam Rencana)	<ul style="list-style-type: none">• Kurikulum ini merupakan kurikulum yang pertama kali dibuat oleh pemerintah pertama setelah kemerdekaan Indonesia.• Berkiblat pada kurikulum belanda yang bersifat diskriminatif. Terjadi pengelompokan sesuai strata sosial (anak Belanda, anak Timur asing, anak pribumi yang terdiri dari strata sosial bawah dan priyai) (Alhamuddin, 2019).• Aspek pendidikan karakter dalam hal rasa nasionalisme lebih diutamakan dibanding aspek kognitif (Insani, 2019).• Jumlah mata pelajaran di tiap jenjang: Sekolah rakyat (SR) , yang merupakan setingkat Sekolah Dasar hari ini, sebanyak 16 bidang studi,

Tahun	Kurikulum	Karakteristik
		<p>Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 17 bidang studi, serta Sekolah Menengah Atas (SMA) jurusan B 19 bidang studi (Abdullah, 2007).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pengajaran menitikberatkan pada cara bagaimana cara guru mengajar dan kemudian bagaimana cara murid mempelajari apa saja yang mereka peroleh dari guru (Wahyuni, 2015).
1952	Rencana Pelajaran Terurai 1952	<ul style="list-style-type: none"> • Kurikulum yang dibuat oleh pemerintah sudah diarahkan dan diatur dalam suatu sistem pendidikan yang bersifat nasional dalam bentuk peraturan pemerintah pertama yang mengatur pendidikan secara nasional (Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian daripada Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan; Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi). • Rencana pembelajaran yang tercantum dalam silabus berisikan konten pelajaran yang mesti dihubungkan dengan keseharian siswa (Wahyuni, 2015). • Mata pelajaran yang akan diajarkan oleh guru, diklasifikasikan dalam bentuk lima kelompok bidang studi, yaitu: bidang studi tentang moral, bidang kecerdasan, bidang emosionalistik/ artistik, bidang ketrampilan, dan terakhir bidang jasmani (Alhamuddin, 2019).
1964	Rencana Pendidikan Sekolah Dasar 1964	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan konsep pembelajaran aktif, kreatif, dan produktif (Insani, 2019). • Penetapan hari krida oleh pemerintah, yaitu suatu hari di mana pada peserta didik diberikan keleluasaan untuk mengembangkan potensi mereka masing-masing dalam berbagai bentuk kegiatan (Insani, 2019). • Kurikulum 1964 dirancang oleh pemerintah sebagai alat untuk mencetak manusia Indonesia yang Pancasila dan yang sosialis dengan sifat-sifat seperti yang termaktub dalam Tap MPRS No. II tahun 1960 (Alhamuddin, 2019).
1968	Kurikulum 1968	<ul style="list-style-type: none"> • Pelajaran bersifat teoritis. Guru memberikan materi sesuai dengan apa yang tertera pada perencanaan yang telah dibuat oleh pemerintah, meskipun tidak memiliki kaitan dengan permasalahan yang terjadi di kehidupan keseharian siswa. • Isi kurikulum yang akan diajarkan guru hanya memuat tiga aspek, yaitu: tujuan materi, metode pembelajaran dan evaluasi terhadap perkembangan siswa (Asri, 2017). • Bersifat <i>Correlated Subject Curriculum</i>, yang bermakna terjadi keselarasan materi kurikulum pada tiap jenjang pendidikan.
1973	Kurikulum Proyek Perintis Sekolah Pembangunan (PPSP) tahun 1973	<ul style="list-style-type: none"> • Berorientasi kepada tujuan pendidikan. Pemerintah merumuskan berbagai tujuan-tujuan yang harus dikuasai oleh siswa dalam pembelajaran, atau yang lebih dikenal dengan hierarki tujuan pendidikan, yang meliputi: tujuan pendidikan nasional, tujuan institusional, tujuan kurikuler, tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. • Menganut pendekatan integratif, yaitu setiap pelajaran memiliki arti dan peranan yang menunjang kepada tercapainya tujuan-tujuan yang lebih integratif (Muhammedi, 2016).
1975	Kurikulum 1975	<ul style="list-style-type: none"> • Kurikulum di buat oleh pemerintah pusat yang selanjutnya dilanjutkan oleh sekolah-sekolah (sentralistik) (Nurhalim, 2011). • Terdapat Prosedur Pengembangan Sistem Instruksional (PPSI), yakni sebuah prosedur dalam pencapaian tujuan pembelajaran siswa yang dibuat oleh guru dengan cara dibuatnya tujuan instruksional umum dan tujuan instruksional khusus pada setiap bahasan materi. Prosedur ini akan dibuat dalam bentuk dokumen perencanaan yang disebut "Satuan Pelajaran". • Kurikulum bersifat <i>Integrated Curriculum Organization</i>, yang bermakna dalam pengorganisasian kurikulum terdapat kesatuan di tiap-tiap bagiannya. (Abdullah, 2007).
1984	Kurikulum 1984	<ul style="list-style-type: none"> • Pendekatan pengajaran CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif), yang bermakna bahwasanya siswa diberi kesempatan untuk aktif secara fisik, mental, intelektual, dan emosional. Hal ini bertujuan untuk memberi siswa pengalaman belajar yang maksimal dari tiga ranah kompetensi; ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.

Tahun	Kurikulum	Karakteristik
		<ul style="list-style-type: none"> Siswa diposisikan sebagai subjek belajar. Hal ini dapat dimulai dari kegiatan mengamati sesuatu, mengelompokkan ke dalam sub unit tertentu, mendiskusikan baik dengan guru, maupun dengan sesama siswa, dan yang terakhir adalah melaporkan hasil yang mereka peroleh kepada guru (<i>Student Active Learning</i>) (Wahyuni, 2015). Bersifat <i>Content Based Curriculum</i> Mulai diberlakukannya dua jenis muatan kurikulum yang selanjutnya dipakai hingga hari ini, yaitu: kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal (Abdullah, 2007).
1994	Kurikulum 1994	<ul style="list-style-type: none"> Perubahan sistem semester ke sistem catur wulan. Sifat kurikulum yaitu <i>Objective Based Curriculum</i> (Abdullah, 2007). Dalam dokumen kurikulum, pemerintah sudah menyiapkan materi secara keseluruhan, sehingga guru sangat mudah dalam menyusun mata pelajaran yang akan diajarkan (Suderajat, 2004). Muatan kurikulum yang terlampau padat, menyebabkan kembalinya proses pembelajaran yang satu arah; dari guru ke siswa, dikarenakan guru dituntut untuk mencapai target kurikulum yang terlampau padat tersebut (Abdullah, 2007). Pemberian materi pelajaran terfokus pada konsep menghafal materi-materi yang bersumber dari ahli-ahli tentang suatu konsep tanpa memahami isi materi tersebut. Akibatnya adalah siswa hanya mengikuti tanpa bisa berpikir kritis terhadap pengetahuan yang mereka peroleh. Tugas mereka hanya menghafalkan teori yang ada yang pada akhirnya anak akan menjadi siswa yang pasif dan tidak berkembang (Insani, 2019).
1997	Revisi Kurikulum 1994	<ul style="list-style-type: none"> Dibuat sebagai bentuk revisi terhadap kurikulum 1994 yang dirasa terlampau padat (Afifah, 2012). Terdapat beberapa perbaikan dari kurikulum 1994 di antaranya dalam hal kompetensi siswa. Dalam kurikulum 1997 ini terdapat penyempurnaan kurikulum yang bertujuan untuk dihasilkannya proporsi yang adil antara tujuan yang diharapkan diperoleh oleh siswa dengan beban belajar mereka, potensi siswa, dan keadaan lingkungan serta sarana pendukungnya (Muhammedi, 2016).
2004	Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK)	<ul style="list-style-type: none"> Fokus kurikulum adalah adanya pertumbuhan dan perkembangan kompetensi peserta didik (<i>Competency Based Curriculum</i>) Prinsip pembelajaran berpusat kepada siswa dengan mengutamakan proses pembelajaran dengan pendekatan kontekstual (<i>Contextual Teaching and Learning</i>). Dalam pelaksanaan KBK, guru sebagai fasilitator, yakni seseorang yang kreatif dalam pengelolaan kelas sehingga suasana pembelajaran hidup, menarik, rileks, bervariasi, menimbulkan rasa ingin tahu siswa, serta pengembangan daya nalar kritis siswa (Abdullah, 2007).
2006	Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)	<ul style="list-style-type: none"> Aspek isi dan proses pencapaian target kompetensi siswa, hingga teknis evaluasi tidak banyak berbeda dengan KBK. Dalam merencanakan pembelajaran, guru diberi kebebasan untuk melakukan jenis metode yang diinginkan sesuai dengan kondisi lingkungan, kebutuhan siswa, dan kondisi sekolah (Sidqi & Ulya, 2019). Kompetensi Dasar (KD), Standar Kompetensi Lulusan (SKL), dan Standar Kompetensi (SK) setiap mata pelajaran untuk setiap satuan pendidikan telah ditetapkan oleh Departemen Pendidikan Nasional. Namun, pengembangan perangkat pembelajaran, seperti silabus, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan sistem penilaian merupakan kewenangan satuan pendidikan (sekolah) di bawah koordinasi dan supervisi pemerintah Kabupaten/ Kota. Manajemen sekolah di berlakukan dengan langkah penyiapan konsep yang dilakukan dewan sekolah (school Board), serta dibentuknya komite sekolah di setiap sekolah (Hidayat, 2006). Berpusat pada potensi, perkembangan, serta kebutuhan peserta didik dan lingkungannya. Pengembangan kurikulum didasarkan atas prinsip bahwa

Tahun	Kurikulum	Karakteristik
		peserta didik adalah sentral proses pendidikan agar menjadi manusia yang bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, serta warga negara yang demokratis sehingga perlu disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan lingkungan siswa (Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah).
2013	Kurikulum 2013	<ul style="list-style-type: none"> • Mengutamakan pendidikan karakter. Hal ini didasari pada empat kompetensi yang mesti dicapai siswa: Kompetensi Inti 1 (KI 1) olah hati, Kompetensi Inti 2 (KI 2) olah rasa, Kompetensi Inti 3 (KI 3) olah pikir, dan Kompetensi Inti 4 (KI 4) olah raga. pada KI 1 dan KI 2, siswa diharapkan dapat menjadi manusia berketuhanan dengan sikap yang baik. Namun, karakter tersebut juga diaplikasikan pada KI 3 dan KI 4, di mana nilai-nilai ketuhanan dan sikap yang baik mempengaruhi intelektual dan juga tindakan siswa. • Dalam proses pembelajaran, siswa diberi ruang untuk dapat mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta (<i>Student Centered</i>) • Pendekatan yang dilakukan pada saat pembelajaran adalah pendekatan saintifik (<i>Scientific Approach</i>)

Sumber: Hasil analisis peneliti, 2021

Dalam perjalanan kurikulum bangsa Indonesia, menurut penulis model-model implementasi kurikulum Ornstein dan Hunkins telah diaplikasikan pada setiap kurikulum yang berlaku di tiap-tiap masa tersebut dalam perspektif teoritis. Kurikulum 1947 hingga kurikulum 1975 lebih menitikberatkan pada subjek atau isi pembelajaran yang diberikan kepada siswa. Siswa dituntut untuk memahami dan mengamalkan isi materi pembelajaran yang diberikan oleh guru dalam model satu arah khususnya yang berkenaan tentang kepancasilaan dan kewarganegaraan. Jika kita telaah bentuk implementasi kurikulum untuk dua jangka masa (1947-1975) ini, model-model implementasi kurikulum modernisme lah yang banyak digunakan. Seperti diketahui, model-model modernisme dalam pendidikan khususnya pembelajaran bertumpu pada guru sebagai *main actor* dalam proses pembelajaran dengan metode ceramah. Hal ini menyebabkan nalar peserta didik tidak terasah dan tidak teraktualisasikan (Suhendra, 2016).

Berbeda dengan kurikulum tahun 1975, pada periode kurikulum 1984 hingga kurikulum 2013, terdapat paradigma baru dalam mengimplementasikan kurikulum pendidikan dari yang sebelumnya berorientasi pada isi dan guru sebagai *center* (pusat) dalam pembelajaran menjadi implementasi kurikulum yang berorientasi pada siswa. Sebagai contoh, pada kurikulum 1984 diberlakukan sistem pembelajaran CBSA (Cara Belajar Siswa Aktif), yang mana sistem ini menitikberatkan pada peran siswa yang lebih banyak dalam mengimplementasikan pembelajaran, namun agak kurang berorientasi pada isi/materi pembelajaran. Begitupun halnya pada kurikulum 1994, model implementasi kurikulum yang diterapkan lebih memperhatikan kembali isi dari materi pembelajaran. Setelah masa reformasi tahun 1998, segala aspek kehidupan bernegara di Indonesia telah mengalami perubahan dari yang sebelumnya sentralistik menjadi desentralistik. Hal ini berarti bahwa pelaksanaan kurikulum telah memasuki fase yang baru, yaitu fase di mana implementasi kurikulum telah diberikan seluas-luasnya untuk dikembangkan dan dilakukan inovasi-inovasi. Hal ini terbukti dengan diberlakukannya kurikulum 2004 yang menganut sistem kurikulum berbasis kompetensi. Dalam kurikulum ini antara pemerintah, sekolah dan guru saling berkolaborasi untuk menciptakan model implementasi yang mampu mencakup dua jenis model implementasi kurikulum Ornstein dan Hunkins di atas. Meski kurikulum 2004 telah berganti nama menjadi kurikulum 2006 hingga kurikulum 2013, namun ruh yang masih terkandung di dalam kurikulum 2013 yang berlaku saat ini masih merupakan ruh kurikulum 2004 yang menganut kompetensi.

Lantas, model implementasi kurikulum manakah yang banyak digunakan pada kurikulum 2013? Penulis berpendapat, model postmodernisme lah yang banyak digunakan. Hal ini dapat dilihat pada pendekatan pembelajaran yang digunakan pada kurikulum 2013, yakni pendekatan saintifik (*scientific approach*). Pada pendekatan ini, siswa menjadi pusat pembelajaran, dengan kegiatan-kegiatan yang meliputi: mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyajikan, menyimpulkan, dan mencipta (Majid, 2014). Selain itu, Rajshree (2012) dalam artikelnya, memberikan kesimpulan bahwasanya pada sistem pendidikan saat ini pengajaran lebih melihat keunikan setiap siswa dalam melihat pengetahuan yang akan diberikan kepada mereka. Hal ini sejalan dengan pandangan Ornstein dan Hunkins, yang mengatakan

A postmodern curriculum, while respecting the scientific approach, stresses that there are other avenues of investigation, with moral, religious, and aesthetic traditions that can reveal “truths” that can assist students in developing new world views (Ornstein & Hunkins, 2018).

Maka, jelaslah implementasi kurikulum 2013 banyak menggunakan model postmodernisme di dalamnya, dengan salah satu cirinya adalah penggunaan pendekatan saintifik.

SIMPULAN

Berdasarkan artikel yang telah penulis buat, dapat disimpulkan bahwasanya postmodernisme muncul setelah modernisme, yang mana tujuan awalnya adalah sebagai antitesa dari modernisme. Model implementasi kurikulum modernisme bersifat teratur, adanya hubungan yang erat antara bagian kurikulum atas dan juga pelaksana di bagian bawahnya. Sedangkan model-model implementasi kurikulum postmodernisme lebih bersifat bebas, dengan salah satu karakteristiknya siswa mendapatkan kebebasan dalam pendidikan, karena siswa adalah produsen dari kurikulum, bukan sebagai konsumen. Maka, jika melihat model-model implementasi kurikulum dalam buku Ornstein dan Hunkins terhadap implementasi kurikulum di Indonesia dapat disimpulkan semua model implementasi kurikulum digunakan dalam sejarah perjalanan kurikulum di Indonesia. Terkhusus untuk kurikulum 2013 yang sedang berlaku di Indonesia, model postmodernisme yang digunakan oleh para pengembang kurikulum.

CATATAN PENULIS

Penulis menyatakan bahwa tidak ada konflik kepentingan terkait publikasi artikel ini. Penulis menegaskan bahwa data dan isi artikel bebas dari plagiarisme.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, A. (2007). Kurikulum Pendidikan di Indonesia Sepanjang Sejarah (suatu tinjauan kritis filosofis). *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 13(66), 340. <https://doi.org/10.24832/jpnk.v13i66.354>
- Afifah, R. (2012, December 24). *Jangan Korban Siswa Dengan Perubahan Kurikulum*. <https://regional.kompas.com/read/2012/11/24/09535383/~Edukasi-News>
- Alhamuddin. (2019). *Politik Kebijakan Pengembangan Kurikulum di Indonesia Sejak Zaman Kemerdekaan Hingga Reformasi (1947-2013)*. Prenada Media. https://books.google.co.id/books/about/Politik_Kebijakan_Pengembangan_Kurikulum.html?id=9ByVDwAAQBAJ&redir_esc=y
- Asri, M. (2017). Dinamika Kurikulum di Indonesia. *Jurnal Modeling*, 4(2), 192–202. <http://www.jurnal.stitnualhikmah.ac.id/index.php/modeling/article/view/128>
- Boboc, M. (2012). The Postmodern Curriculum in a Modern Classroom. *International Journal of Education*, 4(1). <https://doi.org/10.5296/ije.v4i1.1167>
- Campbell, M. (2018). Postmodernism and Educational Research. *Open Journal of Social Sciences*, 06(07), 67–73. <https://doi.org/10.4236/jss.2018.67006>
- Danandjaja, J. (2014). Metode Penelitian Kepustakaan. *Antropologi Indonesia*, 52. <https://doi.org/10.7454/ai.v0i52.3318>
- Hamalik, O. (2011). *Kurikulum dan Pembelajaran*. Bumi Aksara.
- Hamengkubuwono. (2016). *Ilmu Pendidikan Dan Teori-Teori Pendidikan*. LP2 STAIN CURUP. <http://repository.iaincurup.ac.id/59/>
- Hidayat, A. R. (2006). Implikasi Postmodernisme Dalam Pendidikan. *Tadrîs: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(1). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.19105/tjpi.v1i1.188>
- Ilham, I. (2018). Paradigma Postmodernisme; Solusi Untuk Kehidupan Sosial? *Urnal Sosiologi USK*, 12(1). <http://e-repository.unsyiah.ac.id/JSU/article/view/11693>
- Insani, F. D. (2019). Sejarah Perkembangan Kurikulum di Indonesia Sejak Awal Kemerdekaan Hingga

- Saat Ini. *As-Salam: Jurnal Studi Hukum Islam & Pendidikan*, 8(1), 43–64. <https://doi.org/10.51226/assalam.v8i1.132>
- Loewenthal, D. (2003). The Other in Educational Research: some postmodern implications for educational practice, theory, research and professionalism. *Research in Post-Compulsory Education*, 8(3), 367–378. <https://doi.org/10.1080/13596740300200160>
- Macdonald, D. (2003). Curriculum Change and the Post-Modern World: Is the school curriculum-reform movement an anachronism? *Journal of Curriculum Studies*, 35(2), 139–149. <https://doi.org/10.1080/00220270210157605>
- Majid, A. (2014). *Strategi Pembelajaran*. Remaja Rosdakarya. <https://www.onesearch.id/Record/IOS2847.INLIS000000000047216#description>
- Maksum, A. (2012). *Pengantar Filsafat: dari masa klasik hingga postmodernisme*. Ar-Ruzz Media. <https://www.goodreads.com/book/show/43152695-pengantar-filsafat>
- Muhammedi. (2016). Perubahan Kurikulum di Indonesia: studi kritis tentang upaya menemukan kurikulum pendidikan Islam yang ideal. *Jurnal Raudhah*, 4(1), 2338 – 2163. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30829/raudhah.v4i1.61>
- Nădrag, L., & Gălbează, A. T.-B. (2015). From Modern to Postmodern Curriculum. *Analele Universității Ovidius Din Constanța. Seria Filologie*, 26(2), 95–105. <https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=522815>
- Nurhalim, M. (2011). Analisis Perkembangan Kurikulum di Indonesia (sebuah tinjauan desain dan pendekatan). *Jurnal INSANIA*, 16(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.24090/insania.v16i3.1597>
- Ornstein, A. C., & Hunkins, F. P. (2018). *Curriculum: Foundations, Principles, and Issues* (Ed. 7). Prentice Hall. https://www.google.co.id/books/edition/Curriculum_foundations_Principles_and_Is/QLQIAQAIAAJ?hl=id&gbpv=0&bsq=Curriculum: Foundations, Principles, and Issues
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, 43 hlm. (2006). https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiY-ZOAp4XyAhVF_XMBHaAjBQAQFjAEegQIIBAD&url=https%3A%2F%2Fjdih.kemdikbud.go.id%2Far%2Fpermen_tahun2006_nomor22.pdf&usq=AOvVaw2JsnUSqCoDa5tcFz5a7DmL
- Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan Sebagian daripada Urusan Pemerintah Pusat dalam Lapangan Pendidikan; Pengajaran dan Kebudayaan kepada Propinsi, (1951). <https://anri.sikn.go.id/index.php/peraturan-pemerintah-nomor-65-tahun-1951-tentang-pelaksanaan-penyerahan-sebagian-dari-pada-urusan-pemerintah-pusat-dalam-lapangan-pendidikan-pengajaran-dan-kebudayaan-kepada-propinsi>
- Piirto, J. (1999). Implications of Postmodern Curriculum Theory for the Education of the Talented. *Journal for the Education of the Gifted*, 22(4), 324–353. <https://doi.org/10.1177/016235329902200402>
- Rajshree. (2012). Themes of Postmodern Education. *International Journal of Scientific and Research Publications*, 2(12q). <http://www.ijsrp.org/research-paper-1212.php?rp=P12453>
- Setiawan, J., & Sudrajat, A. (2018). Pemikiran Postmodernisme dan Pandangannya terhadap Ilmu Pengetahuan. *Jurnal Filsafat*, 28(1), 25. <https://doi.org/10.22146/jf.33296>
- Sidqi, M. F., & Ulya, I. (2019). *Pemikiran Postmodernisme dan Pandangannya Terhadap Pendidikan (studi kritis atas Kurikulum Pendidikan Tinggi Indonesia)*. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31941/jurnalpena.v33i2.903>
- Snyder, H. (2019). Literature Review as a Research Methodology: an overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Suderajat, H. (2004). *Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK): pembaharuan pendidikan dan Undang-Undang Sisdiknas 2003*. Cipta Cekas Grafika. <https://onesearch.id/Record/IOS3107.41274#holdings>
- Suhendra, A. (2016). Hakekat dan Proses Pendidikan Lintas Perspektif (Tradisional, Modernisme, dan Postmodernisme). *Jurnal Darul 'Ilmi*, 4(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.24952/di.v4i1.428>
- Wahyuni, F. (2015). Kurikulum Dari masa Ke Masa (telaah atas penetapan Kurikulum Pendidikan di Indonesia). *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan Dan Keagamaan*, 10(2). <http://ejournal.kopertais4.or.id/mataraman/index.php/alabadiyah/article/view/2792>